

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka berisikan teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian terhadap buku, jurnal ilmiah serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun kajian pustaka pada penelitian ini meliputi:

2.1.1 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, dengan tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan dalam kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini didasarkan pada teori pendapat beberapa ahli yang dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Berikut teori Dana Alokasi Umum menurut pendapat beberapa ahli yang mendasari konsep yang dibangun oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Menurut Faradila, dkk (2021:150) mengemukakan arti Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dan bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke

pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Lalu menurut Anwar Sadat (2022:112) mengemukakan arti Dana Alokasi

Umum adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN dan sebagai sumber dana bagi APBD dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah”.

Dan menurut Hendra dan Wahyudi (2020:60) mengemukakan arti Dana

Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat block grant sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan DAU sesuai kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah guna mengurangi ketimpangan dalam pelaksanaan desentralisasi dan dialokasikan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

2.1.1.2 Indikator Dana Alokasi Umum

Indikator Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Anwar Sadat (2022:112, 115) bahwa Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN dan sebagai sumber dana bagi APBD melalui penerapan formula yang

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

Menurut Hendra dan Wahyudi (2020:60) penetapan besarnya DAU setiap daerah berdasarkan pertimbangan faktor meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan kondisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Muslim dan Syed (2018:54) kebijakan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum ditetapkan 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU perdaerah sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 dan PP No. 55 tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.
- 2) Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah provinsi dan sebesar 90% untuk daerah kabupaten/kota dari besaran DAU secara Nasional.
- 3) Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator yang digunakan oleh peneliti adalah Dana Alokasi Umum yang bersumber dari APBD berdasarkan perhitungan celah fiskal dan alokasi dasar yang telah ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undang. Dimana Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen sumber pendapatan pada APBD.

2.1.1.3 Komponen Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat dua komponen untuk menghitung dana alokasi umum yaitu sebagai berikut:

1) Alokasi Dasar

Alokasi Dasar (AD) ditentukan atas dasar jumlah gaji PNSD, mencakup gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS serta mempertimbangkan kebijakan terkait penggajian dan kebijakan terkait CPNSD.

2) Celah Fiskal

Celah Fiskal (CF) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan anggaran suatu daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing variabel bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, indeks produk domestik regional bruto per kapita.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) proses yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berdasar pada dimensi dasar kualitas hidup manusia untuk dapat menjadi sebuah ukuran mengenai kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun dari tiga dimensi dasar sebagai tolak ukur dalam pembangunan manusia yang menjadi data dari Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. Hal ini didasarkan pada teori pendapat beberapa ahli yang dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Berikut teori Indeks Pembangunan Manusia menurut pendapat beberapa ahli yang mendasari konsep yang dibangun oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Menurut Bonaraja Purba, dkk (2021:26) mengemukakan arti Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

“Pembangunan manusia merupakan sebuah konsep yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Namun, ide dasar dari pembangunan manusia yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia”.

Lalu menurut Angga dan Titi (2020:198) mengemukakan arti Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

“Indeks Pembangunan Manusia merujuk pada falsafah pembangunan nasional dimulai dengan mencermati tujuan dan sasaran pembangunan nasional yaitu peningkatan kualitas manusia dan peningkatan kualitas manusia sebagai sasaran pembangunan mengandung makna peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia”.

Dan menurut Muhammad Idris (2017:125) mengemukakan arti Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

“Indeks Pembangunan Manusia merupakan pendekatan terbaru bagi pengukuran keberhasilan pembangunan yang bertitik sentral kepada pembangunan manusia seutuhnya”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Indeks Pertumbuhan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak-pilihan dengan menempatkan manusia sebagai sasaran dan tujuan akhir pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.

2.1.2.2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Mardiasmo (2021:185) bahwa pencapaian pembangunan manusia dapat diukur dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup.

Hal ini sejalan dengan indikator yang digunakan sebagai ukuran Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Menghitung Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak dengan diwakili dengan tiga indikator yaitu Umum Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH) dan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Namun untuk

memenuhi tuntutan perkembangan, UNDP melakukan penyempurnaan terhadap penghitungan IPM dengan tetap mempertahankan tiga dimensi yang sama tetapi mengubah indikator yang digunakan yang mencakup:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat, diwakili melalui Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- 2) Pengetahuan, pada dimensi ini diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- 3) Standar hidup layak, diukur menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator yang digunakan oleh peneliti adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup.

2.1.2.3 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mardiasmo (2021:185) setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum untuk menghitung indeksnya sebelum digunakan untuk menghitung IPM, rumus yang digunakan sebagai berikut :

Indeks Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Sumber: BPS (2021)

Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Sumber: BPS (2021)

Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Sumber: BPS (2021)

Selanjutnya penghitungan nilai IPM dapat dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Sumber: BPS (2021)

Adapun kemajuan dalam pembangunan manusia memiliki dua perspektif. Pertama adalah kecepatan yang menggambarkan apa yang telah dicapai. Capaian

yang lebih besar berarti menunjukkan adanya kemajuan yang lebih baik. Kedua adalah kecepatan perubahan pembangunan manusia. Kecepatan menunjukkan besarnya perubahan manusia yang berhasil dicapai dalam suatu rentang waktu tertentu. Capaian dan kecepatan dapat dihitung melalui pertumbuhan IPM, sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

Sumber: BPS (2021)

2.1.2.4 Status Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Sulfi (2019:16-17) status Indeks Pembangunan Manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. Status Pembangunan Manusia ditinjau dari tiga tolok ukur adalah sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan harapan kehidupan yang merupakan tolok ukur panjangnya umur seseorang.
- 2) Banyaknya orang dewasa yang dapat membaca diberi nilai dua pertiga dan lamanya bersekolah diberi nilai sepertiga merupakan pengukuran dari tingkat pengetahuan negara tersebut.
- 3) Pendapatan perkapita sebenarnya sesuai dengan daya beli dan mata uang yang dipakai oleh masing-masing negara merupakan pengukuran dari penghasilan suatu negara.

Ditinjau dari ketiga tolok ukur di atas, dan dengan menerapkan formula yang kompleks capaian pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 2.1

Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
≤ 60	Rendah
$0 < IPM < 70$	Sedang
$0 < IPM < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: BPS (2022)

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur pretastasi dan mencerminkan perkembangan suatu perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi daerah tersebut baik begitu juga sebaliknya dan secara berkesinambungan yang menunjukkan output perkapita juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada teori pendapat beberapa ahli yang dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Berikut teori Pertumbuhan Ekonomi menurut pendapat beberapa ahli yang mendasari konsep yang dibangun oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Menurut Annisa, dkk (2022:114) mengemukakan arti Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output masyarakat yang muncul akibat dari semakin meningkatnya jumlah faktor produksi yang digunakan dan terjadi dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya perubahan cara atau penggunaan teknologi produksi itu sendiri”.

Lalu menurut Bonaraja Purba, dkk (2021:16) mengemukakan arti Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan”.

Sedangkan menurut Mariana dan Arifin (2022:296) mengemukakan arti Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

“pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian dengan ditandai kenaikan output masyarakat secara terus menerus dalam jangka panjang disertai meningkatnya pendapatan perkapita suatu negara ke arah yang lebih baik dalam memproduksi barang dan jasa sehingga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Bonaraja Purba, dkk (2021:16) bahwa ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan atas harga konstan untuk skala nasional atau persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan atas harga konstan untuk skala provinsi atau kabupaten/kota.

Hal ini sejalan dengan indikator yang digunakan menurut P. Rahardja dan M. Manurung (2019:292) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi dan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi riil atau perubahan volume produksi dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator yang digunakan oleh peneliti adalah persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan atas harga konstan untuk skala provinsi atau kabupaten/kota.

2.1.3.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Farid Ardyansyah, dkk (2022:38) pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Terdapat beberapa perhitungan pertumbuhan ekonomi diantaranya tiga teknik perhitungan yaitu cara tahunan, rata-rata tiap tahun, dan *compounding factor*. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan :

$$LPE_t = ((PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}) \times 100\%$$

Sumber: Farid, dkk (2022)

Keterangan:

LPE_t = Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun t (%)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan di (-) Tahun lalu

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Menurut Muslim dan Syed (2018:62) dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK pada prinsipnya merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah guna pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

UU Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan menurut Harnovinsah, dkk (2020:130) dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu indikator dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.

Dengan kata lain, hal ini membuktikan bahwa DAU dapat berpengaruh terhadap manusia yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemberian DAU kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari penyerahan tersebut kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyediakan layanan bagi masyarakat sehingga akan

tercipta lingkungan yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang, peningkatan kualitas dan standar pendidikan kehidupan masyarakat sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung dan Made (2021), Rizki dan Kurnia (2021) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti dengan adanya peningkatan Dana Alokasi Umum maka akan berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Anwar Sadat (2022:112) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) disebuah daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Fiscal need merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik

Regional Bruto Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sementara *fiscal capacity* adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH.

Alokasi DAU bagi daerah yang mempunyai potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, apabila daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

Sedangkan menurut Muhammad Idris (2017:181) menjelaskan bahwa dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang menyangkut hubungan fiskal antar jenjang pemerintah, hanya terdapat perubahan-perubahan kecil dan untuk sedikit menaikkan persentase pendapatan negara dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui DAU (Dana Alokasi Umum) yang didasarkan pada rumus transfer tertentu.

Dengan kata lain, hal ini dapat membuktikan bahwa ketika DAU meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, penyebabnya adalah dana transfer yang diterima kabupaten/kota digunakan secara optimal dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah sehingga peningkatan dana alokasi umum akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawati dan Muzdalifah (2022), Sherina dan Andy (2022) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Menurut Harnovinsah, dkk (2020:130) untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Lalu menurut Indra Suhendra (2021:102) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian terus meningkat dan berkembang dengan baik. Kondisi yang demikian diharapkan dapat terus berjalan sehingga berkontribusi bagi peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakatnya. Dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan sumber daya manusia baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas).

Dan menurut Thamrin, dkk (2022:59) rendahnya Indeks Pembangunan Manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas. Produktifitas yang rendah

berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, hal ini dapat membuktikan bahwa ketika tingginya pendapatan masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat memenuhi kualitas pembangunan manusia dan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan meningkatkan produktivitas jika pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devita dkk (2021), Joni dan Megi (2022), Nur Hairiya, dkk (2021) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H₃ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan

Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hendra dan Wahyudi (2020:60) Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan DAU sesuai dengan prioritas aspirasi masing-masing daerah dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi.

Lalu Menurut Harnovinsah, dkk (2020:130) dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu indikator dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*).

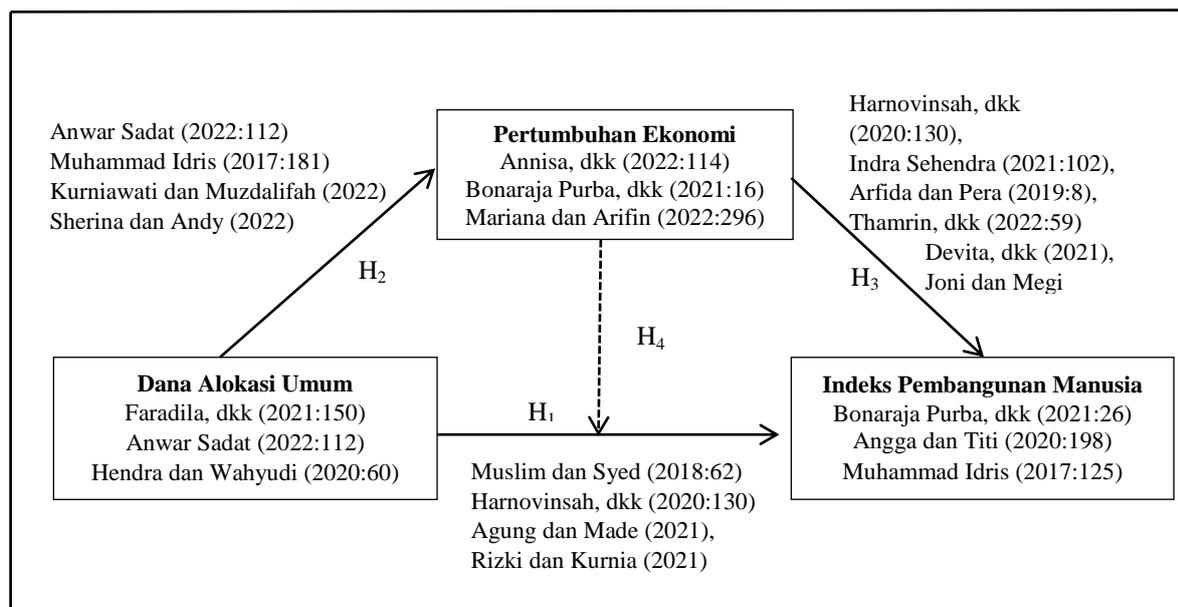
Dengan kata lain, hal ini dapat membuktikan bahwa diikutinya IPM dan PDRB sebagai indikator dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat sebagai block grant, yang secara implisit menegaskan prinsip fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat sehingga meningkatkan kualitas atau kesejahteraan masyarakat. Sehingga besarnya Dana Alokasi Umum setiap daerah akan mempengaruhi tingkat Indeks Pertumbuhan Manusia dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu masih sangat tergantung dengan strategi kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut dan membuktikan bahwa peningkatan IPM dipengaruhi DAU melalui pertumbuhan ekonomi

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawati dan Muzdalifah (2022), Sherina dan Andy (2022) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan penelitian yang dilakukan oleh Devita, dkk (2021), Joni dan Megi (2022), Nur, dkk (2021) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H₄ : Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi melalui Pertumbuhan Ekonomi.

2.2.5 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti dapat memetakan sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Ratna, dkk (2021:53) hipotesis merupakan hubungan logis antara dua atau lebih variabel berdasarkan teori yang masih harus diuji kembali kebenarannya. Dan menurut Umi Narimawati (2020:2) hipotesis merupakan dugaan sementara dari masalah yang diteliti.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara atau dugaan awal sebagai jawaban sementara hubungan antara variabel dengan pernyataan sebelum

dilakukan penelitian dan harus dibuktikan melalui penelitian, dimana dugaan tersebut diperkuat melalui teori / jurnal yang mendasari dan hasil dari penelitian terdahulu.

Sesuai kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H₃ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H₄ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi